BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dunia saat ini sedang dihadapkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, yang tentunya juga dapat berdampak pada kehidupan masyarakat yang diharapkan dapat membawa kemakmuran dan kesejahteraan. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang saat ini terjadi tentunya memiliki banyak dampak bagi masyarakat, dampak tersebut bisa berupa dampak positif maupun negatif. Salah satu bentuk perkembangan ilmu pengetahuan dapat terlihat dari perkembangan pelayanan kesehatan yang ikut terjadi saat ini. Perkembangan tersebut tentunya juga dapat menimbulkan dampak negatif pada masyarakat seperti munculnya tindak pidana dibidang ilmu kesehatan seperti penyalahgunaan obat-obatan tanpa resep.¹ Munculnya berbagai tindak pidana kesehatan tersebut juga tidak terlepas dari berbagai faktor, salah satunya adalah kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh obat dengan mudah dan cepat. Saat ini banyak obat-obatan yang dijual secara bebas dan ilegal oleh toko obat yang tidak memiliki izin, yang tentunya menjadi salah satu faktor pendorong dalam penyalahgunaan obat-obatan tanpa resep.

Seiring dengan banyaknya kasus penyalahgunaan obat keras di masyarakat, Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia

¹ Titon Slamet Kurnia, 2010, *Hak Atas Derajat Kesehatan Optimal sebagai HAM di Indonesia*, PT. Alumni, Bandung, hlm. 13.

mengeluarkan Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Obat-Obat Tertentu yang sering disalahgunakan yang bertujuan untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan obat-obatan tertentu sehingga memerlukan pengawasan secara lebih optimal. Dalam Pasal 1 Ayat (1) Peraturan BPOM Nomor 10 Tahun 2019 tersebut juga telah memberikan definisi dari obat-obat tertentu yang sering disalahgunakan yaitu obat yang bukan termasuk kategori narkotika dan psikotropika yang bekerja dalam sistem susunan saraf pusat yang apabila digunakan dalam dosis lebih dapat menyebabkan ketergantungan dan perubahan pada aktivitas mental dan perilaku. Salah satu jenis obat-obat tertentu yang diatur dalam peraturan tersebut adalah pil sapi (*trihexyphenidyl*). Secara medis, pil sapi dikategorikan sebagai obat anti muskarinik yang berguna untuk membantu meredakan rasa kaku pada penderita penyakit parkinson. Penyalahgunaan obat tersebut dapat disebabkan oleh berbagai faktor, seperti misalnya harga yang murah dan dapat dibeli tanpa resep dokter melalui toko obat ilegal.

Penyalahgunaan pil sapi di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dapat dikatakan masih cukup tinggi. Seperti yang berhasil diungkap oleh Polres Gunungkidul yang berhasil menangkap pengedar dengan barang bukti sebanyak 1.470 pil sapi². Berdasarkan penangkapan tersebut diketahui bahwa pil sapi tersebut akan dijual seharga Rp 50.000 per stripnya. Selain itu,

² Nanda Sagita, 2024, "6 Pengedar Narkoba di Gunungkidul Diringkus, 1.470 Butir Pil Sapi Disita", <https://jogja.tribunnews.com/2024/06/21/6-pengedar-narkoba-di-gunungkidul-diringkus-1470-butir-pil-sapi-disita>, diakses 3 Oktober 2024.

berdasarkan penelusuran lainnya dapat diketahui bahwa kasus penyalahgunaan pil sapi juga terjadi di wilayah Kabupaten Sleman. Seperti yang terjadi pada bulan Agustus 2024, dimana seorang ayah dan anak yang merupakan seorang pengemudi jeep wisata ditangkap oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sleman dikarenakan menggunakan pil sapi.³ Penangkapan tersebut disertai dengan barang bukti sebanyak 84 butir pil sapi yang akan dikonsumsi secara pribadi. Hal tersebut diketahui bahwa penyalahgunaan pil sapi tidak hanya dilakukan oleh remaja melainkan orang dewasa. Terlebih dalam beberapa penangkapan yang dilakukan di wilayah hukum Daerah Istimewa Yogyakarta diketahui bahwa rata-rata barang bukti yang berhasil diamankan akan dijual kepada masyarakat secara umum dengan harga yang terbilang murah.

Penyalahgunaan pil sapi tentunya juga dapat menimbulkan permasalahan lainnya bagi para pengguna, mulai dari masalah kesehatan yang mungkin timbul hingga munculnya tindak pidana lainnya. Salah satunya adalah tindak pidana kejahatan jalanan atau klitih yang dipengaruhi oleh maraknya penyalahgunaan pil sapi sebelum para pelaku melakukan tindak kriminal.⁴ Hal tersebut tidak terlepas dari dampak yang dirasakan setelah mengkonsumsi pil sapi yaitu rasa berani yang muncul pada diri pelaku penyalahguna.

³ Jauh Hari Wawan, Konsumsi Pil Sapi, Bapak-Anak Driver Jip Wisata di Sleman Dicidaduk Polisi, <https://www.detik.com/jogja/berita/d-7485545/konsumsi-pil-sapi-bapak-anak-driver-jip-wisata-di-sleman-dicidaduk-polisi/amp> , diakses 3 Oktober 2024.

⁴ AYO JOGJA, Polda DIY Sebut Pil Koplo Punya Dampak Besar Timbulkan Klitih, <https://www.ayoyogya.com/ngayogyakarta.amp/pr-392321260/polda-diy-sebut-pil-koplo-punya-dampak-besar-timbulkan-klitih> , diakses 3 Oktober 2024.

Berdasarkan penelusuran lain yang dilakukan diketahui bahwa pelaku yang berhasil ditangkap oleh pihak kepolisian terkait tindak pidana pil sapi dikenakan Pasal 435 jo. Pasal 436 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Selanjutnya disebut UU Kesehatan). Pasal tersebut pada intinya melarang setiap orang untuk memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi berupa obat keras yang tidak memenuhi standar, persyaratan keamanan, dan mutu. Melihat rumusan pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa pasal tersebut hanya dapat dikenakan kepada pelaku sebagai pembuat dan pengedar, hal tersebut tentunya memerlukan aturan hukum yang mengatur secara khusus mengenai larangan penyalahgunaan obat-obatan dalam hal ini bagi pelaku pengguna guna memutus mata rantai penyalahgunaan obat keras tanpa izin di masyarakat. Mengingat maraknya kasus penyalahgunaan pil sapi tentunya dapat menimbulkan keresahan di masyarakat yang apabila tidak ditanggapi dengan serius sama saja membiarkan masyarakat untuk mendapatkan berbagai risiko, dan membiarkan kejahatan terus berkembang di dalam masyarakat.⁵

Berdasarkan uraian di atas, timbul pertanyaan bagaimana penegakan hukum terhadap penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman dan bagaimana tantangan serta hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman. Hal tersebut menjadi menarik minat penulis untuk melakukan penelitian dengan judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYALAHGUNAAN *TRIHXYPHENIDYL* (PIL SAPI)**

⁵ Afifah Naurah Salsabila, dkk., 2020, Tindak Pidana Mengedarkan Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Studi Putusan Nomor 739/Pid.Sus/2014/PT-Mdn, *Doktrina: Journal of Law*, Vol. III, No. 2, hlm. 100.

YANG DIATUR DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2023 TENTANG KESEHATAN”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis paparkan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana upaya dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang menyebabkan penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya dan kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang ilmu hukum khususnya di bidang Hukum Pidana, dalam hal untuk mengetahui faktor penyebab penyalahgunaan pil sapi

serta tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk pihak-pihak terkait yang berhubungan dengan isu hukum yaitu:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan masukan kepada pemerintah supaya lebih memperhatikan dan mengawasi lebih lanjut terkait penegakan hukum pidana penyalahgunaan pil sapi.

b. Bagi Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kajian akademis mengenai pola, faktor penyebab, dan dampak penyalahgunaan pil sapi sehingga dapat menjadi referensi dalam formulasi kebijakan dan strategi intervensi oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

c. Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman mengenai bahaya penyalahgunaan narkotika, sehingga dapat mendorong kesadaran masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan penyalahgunaan narkotika.

E. Keaslian Penelitian

Tulisan penulis dengan judul Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman, merupakan karya penelitian hukum asli penulis dan bukan merupakan hasil dari plagiasi. Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan, ditemukan beberapa judul penelitian yang hampir sama dengan judul penelitian ini yang ditulis oleh:

1. Edu, 14410506, Universitas Islam Indonesia Yogyakarta, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Peredaran Obat Keras Pil Sapi (*Trihexyphenidyl*) di Wilayah Hukum Gunungkidul.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Apa modus operandi tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi di Wilayah Hukum Gunungkidul?
- 2) Bagaimana penegakan hukum tindak pidana peredaran obat keras Pil Sapi di Wilayah Hukum Gunungkidul?

b. Hasil Penelitian:

Terjadi peningkatan jumlah pengedar pil sapi di Wilayah Gunungkidul dengan menggunakan modus operandi peredaran dengan memanfaatkan teknologi informasi, seperti media sosial. Adapun secara umum penegakan hukum terhadap peredaran pil sapi sudah cukup baik akan tetapi masih terdapat beberapa kendala seperti kurangnya sarana prasarana baik laboratorium, personil kepolisian,

dan kurangnya partisipasi masyarakat dalam memberikan informasi terkait tindak pidana peredaran pil sapi.

c. Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Edu adalah penelitian tersebut berfokus pada tindak pidana peredaran pil sapi di wilayah hukum Gunungkidul beserta modus operandi pengedar pil sapi. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman beserta tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

2. Annisa Aprilia Ahnaf, 20190610133, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Terhadap Anak Pelaku Pengedaran Obat Keras (*Trihexyphenidyl*) Pada Pengadilan Negeri Wonosari.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan anak mengedarkan obat keras *trihexyphenidyl* atau pil sapi?
- 2) Bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap pengedaran obat keras *trihexyphenidyl* oleh anak?

b. Hasil Penelitian:

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap anak pelaku pengedaran pil sapi pada Pengadilan Negeri Wonosari melalui

pertimbangan yuridis yang terdiri dari Undang-Undang Kesehatan dan Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Lebih lanjut, pertimbangan non-yuridis didasarkan pada usia anak serta faktor yang mendorong anak pelaku sebagai pengedar pil sapi. Adapun faktor-faktor yang dapat mendorong anak pelaku menjadi pengedar pil sapi dapat disebabkan oleh faktor lingkungan pertemanan yang buruk dan didominasi oleh sesama pengonsumsi pil sapi.

c. Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Annisa Aprilia Ahnaf merupakan penelitian yang berfokus pada anak pelaku sebagai pengedar pil sapi di wilayah hukum Wonosari. Sedangkan penelitian yang ditulis dalam penulisan hukum ini membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman beserta tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

3. Indra Mulyana, 141000068, Universitas Pasundan Bandung, Tinjauan Yuridis terhadap Tindak Pidana Pengedaran Obat Jenis *Trihexyphenidyl* Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

a. Rumusan Masalah:

- 1) Bagaimana kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku pengedaran obat jenis *trihexyphenidyl* yang tidak

memiliki kompetensi farmasi dalam peredaran obat tanpa izin edar?

2) Apakah faktor penyebab pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan obat sebagai sediaan farmasi yang tidak memiliki izin edar?

3) Bagaimana upaya penanggulangan terhadap peredaran obat jenis *trihexyphenidyl* tanpa izin edar di masyarakat?

b. Hasil Penelitian:

Tindak pidana mengedarkan obat jenis *trihexyphenidyl* sebagai sediaan farmasi tanpa izin edar telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagai bentuk tindak pidana kesengajaan. Adapun faktor-faktor yang mendorong pelaku melakukan tindak pidana mengedarkan *trihexyphenidyl* adalah faktor penyebab dari sisi Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 itu sendiri, serta upaya yang dapat dilakukan dalam penanganan tindak pidana ini adalah meliputi kebijakan penal dan non penal.

c. Perbedaan:

Penelitian yang dilakukan penulis tersebut memiliki beberapa perbedaan. Letak perbedaannya adalah penelitian yang dilakukan oleh saudara Indra Maulana merupakan penelitian yuridis normatif yaitu mengenai Pengedaran Obat Jenis *Trihexyphenidyl* Sebagai Sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Sedangkan penelitian yang

ditulis dalam penulisan hukum ini merupakan penelitian empiris yang membahas terkait penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman beserta tantangan dan hambatan dalam penegakan hukum tersebut.

F. Batasan Konsep

Berdasarkan judul penelitian di atas, maka batasan konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dapat diartikan sebagai sebuah bentuk pelaksanaan aturan hukum pidana dengan melarang apa saja yang bertentangan dengan aturan hukum tersebut dan memberikan sanksi kepada yang melanggar larangan tersebut.⁶

2. Penyalahgunaan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, penyalahgunaan berasal dari kata salah guna yang dapat diartikan sebagai sebuah proses, cara, atau perbuatan menyalahgunakan sesuatu yang tidak sebagaimana mestinya.⁷

3. Obat Keras Pil Sapi (*Trihexyphenidyl*)

Pil Sapi atau *trihexyphenidyl* merupakan salah satu obat anti muskarinik yang berfungsi sebagai obat bagi penderita parkinson. Obat

⁶ Sudarto, *Loc. Cit.*

⁷ KBBI Daring, <https://kbbi.kemdikbut.go.id/entri/penyalahgunaan> , diakses 3 Oktober 2024.

ini bekerja dengan mengendalikan fungsi otot dan mengurangi kekakuan pada penderita Parkinson.⁸

4. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2023 Tentang Kesehatan

Undang-Undang ini mengatur tentang kesehatan dengan menetapkan batasan istilah yang digunakan dalam pengaturannya. UU ini berisi mengenai ketentuan umum, hak dan kewajiban, tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, penyelenggaraan kesehatan, upaya kesehatan, fasilitas pelayanan kesehatan, sumber daya manusia kesehatan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan penelitian hukum empiris yang berfokus pada fakta sosial. Penelitian ini dilakukan secara langsung kepada responden untuk memperoleh data primer yang didukung dengan data sekunder terdiri atas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari narasumber tentang objek yang diteliti sebagai data utama.

⁸ Ari Sutyasmanto, 2023, “*Mereka Menyebutnya Pil Sapi*”, <https://yogyakarta.bnn.go.id/mereka-menyebutnya-pil-sapi/>, diakses 3 Oktober 2024.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan. Bahan dalam data sekunder terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, sebagai berikut :

1) Bahan Hukum Primer

- a) Undang–Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b) Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
- d) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 919/MENKES/PER/X/1993 tentang Kriteria Obat yang dapat Diserahkan Tanpa Resep; dan
- e) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan, Pembatasan, dan Kategori Obat.

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh dari jurnal, buku, internet, hasil penelitian. Dalam penelitian ini, informasi yang diberikan oleh narasumber sangat diperlukan, karena berdasarkan jabatan, profesi, dan/atau keahlian mereka, dapat membantu dalam menganalisis rumusan masalah.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini, terdiri dari:

a. Wawancara

Wawancara merupakan proses komunikasi guna memperoleh data yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab secara lisan. Wawancara dilakukan dengan memberikan daftar pertanyaan terbuka kepada narasumber.

b. Studi Pustaka

Dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Studi kepustakaan dilakukan untuk menunjang wawancara dengan para narasumber yaitu dengan cara memahami buku, Peraturan Perundang-Undangan, pendapat hukum dan non hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

4. Lokasi

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan. Lokasi penelitian dilakukan di Polres Sleman dan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Sleman.

5. Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang karena jabatannya, profesi maupun keahliannya memberikan jawaban atas pertanyaan peneliti guna melengkapi data yang diperoleh dari responden. Narasumber dalam penelitian ini adalah Bapak AKP Farid M. Noor, S.H., M.M., selaku

penyidik di Satuan Reserse Narkoba Polresta Sleman dan Bapak Yudha, S.H., selaku pemberantas di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Sleman.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah metode kualitatif. Metode kualitatif merupakan suatu metode analisis data yang diterapkan pada pemahaman dan pengolahan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara dengan responden dan narasumber serta hasil studi kepustakaan. Berdasarkan data yang didapat, kemudian dianalisis dan disimpulkan dengan metode berpikir induktif yaitu menarik kesimpulan dengan proses awal yang khusus dan berakhir dengan suatu kesimpulan berupa pemikiran yang umum.

H. Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika penulisan skripsi merupakan rencana isi penulisan skripsi :

BAB I : PENDAHULUAN

Bab ini berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, keaslian penelitian, batasan konsep, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

BAB II : PEMBAHASAN

Bab ini berisi kajian tentang penegakan hukum pidana, kajian tentang narkoba dan penyalahgunaan narkoba, kajian tentang penyalahgunaan pil sapi, faktor penyebab penyalahgunaan *Trihexyphenidyl* (pil sapi) di Kabupaten Sleman, serta upaya dan

kendala dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana penyalahgunaan pil sapi di Kabupaten Sleman.

BAB III : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.